



## Kerugian Perjalanan Dinas, Kejari Gandeng BPK

**NEGARA** - Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mengusut tuntas dugaan korupsi perjalanan dinas di lingkungan Pemkab Jembrana. Kerjasama ini dilakukan untuk mengungkap berapa besar kerugian negara akibat kasus tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Negara Anton Delianto melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Suhadi, Jumat (26/6) kemarin mengatakan hal itu saat dikonfirmasi wartawan. Ia mengatakan, kerjasama ini disepakati saat dilakukan gelar perkara kasus ko-

rupsi perjalanan dinas di Denpasar, Kamis (25/6) kemarin. Dalam gelar perkara tersebut disepakati kerjasama antara kedua lembaga untuk menuntaskan kasus yang sudah mulai diusut sejak beberapa tahun lalu itu.

"Kami meminta bantuan BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap kasus korupsi perjalanan dinas tersebut. Audit ini dilakukan khusus untuk menemukan berapa besar kerugian negara akibat kasus tersebut. Selama ini prediksi kerugian negara mencapai sekitar Rp 600 juta," kata Suhadi kemarin.

Menurut dia, kerugian sebesar

itu baru merupakan prediksi sesuai dengan angka kerugian hasil audit umum yang dilakukan BPK beberapa tahun lalu. Karena temuan tersebut berasal hasil audit umum, pihak kejaksaan ingin agar BPK melakukan audit investigasi. Dan hal itu sudah disepakati karena pihak BPK sudah men-

yatakan kesanggupannya untuk membantu Kejari Negara.

Terkait desakan tersangka kasus korupsi perjalanan dinas, I Gede Winasa kepada penyidik Kejari Negara untuk mengusut kasus 63 tiket palsu yang digunakan dalam pertanggungjawaban kasus perjalanan

dinas, Suhadi mengaku akan menyelidikinya. Namun hingga saat ini pihaknya belum menemukan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Jadi, untuk sementara penyidik Kejari Negara baru menetapkan satu nama sebagai tersangka, yakni I Gede Winasa. **(don/gup)**

Edisi : Sabtu, 27 Juni 2015

Hal : 33



# Pemkab Tabanan Siap Jalankan PR dari BPK



KETUT SUGINA/BALI EXPRESS

**BANYAK PR :** Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti saat pembacaan tanggapan atas pandangan umum fraksi dalam sidang Paripurna di DPRD Tabanan, Kamis (25/6).

## Sidang Paripurna DPRD Tabanan

**TABANAN** - Tuntutan agar Pemkab Tabanan meningkatkan kinerjanya dalam hal pengelolaan keuangan daerah, seperti disampaikan DPRD setempat dalam sidang paripurna pada Rabu (24/6) lalu, disambut hangat Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti. Dorongan tersebut dianggap sebagai *support* bagi pihaknya untuk terus berbenah diri dalam hal yang ditekankan Dewan Tabanan. Hal itu diungkapkan Bupati Eka dalam sidang paripurna dengan agenda pembacaan tanggapan bupati atas pandangan

umum fraksi, Kamis lalu (25/6).

Diakui Bupati Eka, meski di tahun ini Pemkab Tabanan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sejumlah pekerjaan rumah (PR) masih perlu dikerjakan. Khususnya yang berkaitan dengan beberapa catatan yang direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dibenahi. "Sesuai dengan komitmen kita, prestasi ini (WTP) tidak boleh membuat kita cepat puas diri," ujar Bupati Eka.

Bupati Eka juga sempat menanggapi sejumlah saran dan pertanyaan yang sempat disampaikan beberapa fraksi. Baik yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran hingga

menyangkut pelayanan publik. Misalkan menyangkut soal Silpa (sisa lebih pagu anggaran) yang nilainya mencapai Rp 121,3 miliar. Sesuai jawaban bupati, hal itu disebabkan adanya pelampauan penerimaan sebesar Rp 49 miliar lebih di samping adanya sisa dana sertifikasi sebesar Rp 31 miliar lebih, sisa kegiatan DAK sebesar Rp 11 miliar lebih. "Serta penghematan belanja sebesar Rp 30 miliar lebih," imbuhnya.

Demikian halnya menyangkut pembangunan infrastruktur khususnya jalan kabupaten, sambungnya, dalam beberapa tahun terakhir pihaknya sudah memprioritaskan peningkatan kualitas

Edisi : Sabtu, 27 Juni 2015

Hal : 31



## Radar Bali

jalan dengan menggunakan material hotmix. "Namun mengingat keterbatasan dana, jalan kabupaten yang mampu tertangani sejauh ini hampir 32 persen," ujarnya.

Kendati demikian, komitmen untuk meningkatkan kualitas jalan tetap menjadi salah satu prioritas program pembangunan pihaknya. Sehingga pihaknya berupaya meniasati keterbatasan anggaran dengan menggulirkan program Gerbang Indah Serasi (GIS). Khususnya untuk pembangunan jalan desa. "Kami mencoba memadukannya dengan program GIS yang rohnya merupakan Tri Sakti yakni gotong royong" jelasnya. (gin/han)

Edisi : Cabv, 27 Juni 2015

Hal : 31



# Tunggakan Tembus Rp 2,5 Miliar

## Pajak di Karangasem, Rp 800 Juta Hilang

**AMLAPURA-** Dinas Pendapatan Karangasem mencatat tunggakan pajak hingga akhir bulan ini, mencapai Rp 2,5 miliar. Tunggakan itu berasal dari berbagai wajib pajak. Paling tinggi adalah pajak hotel dan restoran. Kepala Dinas Pendapatan Karangasem Nengah Toya menyebutkan, tunggakan pajak itu menjadi hal biasa di Karangasem.

Pasti ada tunggakan dari wajib pajak, tiap tahunnya. "Kan biasa, ada yang belum bisa bayar tahun ini, dibayar tahun depan. Jadinya kena denda. Selama wajib pajaknya masih ada, tidak masalah," tegas Toya. Hanya saja, dari jumlah tunggakan itu, sekitar Rp 800 juta sudah dipastikan hilang tidak bisa ditagih. Karena, wajib pajak sudah menghilang, lantaran perusahaannya sudah tutup, atau peralihan kepemilikan. Ketika ada seperti itu, pemerintah tegas dia, tidak bisa membebaskan tunggakan itu kepada manajemen baru. Hanya saja Toya tak merinci jumlah wajib pajak yang masih memiliki tunggakan dan tidak bisa ditagih. Pihaknya sebatas menyebut beberapa perusahaan yang bangkrut sehingga tidak melunasi hutangnya. Misalnya, Hotel Balina di Buitan (Manggis), dan Hotel Indra Udayana di Bunutan (Abang). "Karena wajib sudah hilang, makanya tunggakan tidak bisa dilunasi. Jumlahnya

sekitar Rp 800 juta, hilang," sebut Toya.

Tunggakan yang tidak bisa ditagih itu, sudah terjadi sejak lama, atau sebelum dirinya menjabat selaku Kepala Dinas Pendapatan, tahun 2013 lalu. Sehingga, dia mengaku tak tahu pasti, hingga perusahaan wajib pajak bangkrut, dan pajak tidak dilunasi. Padahal, sudah ada mekanisme agar wajib pajak melunasi hutangnya. Misalnya, diberikan teguran hingga surat paksa. "Pajak yang sudah tak bisa ditagih itu, bisa dibilang tunggakan karatan," tandas Toya, ditemui Jumat (26/6).

Tunggakan pajak yang sudah tak bisa ditagih itu, tetap masuk daftar piutang pajak di Dinas Pendapatan. Bahkan, beberapa kali sempat jadi temuam BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Namun, setelah dilaporkan kondisi riilnya, tunggakan itu berhenti jadi temuan BPK. Agar tidak terus menjadi catatan tunggakan, Pemkab Karangasem berencana melakukan penghapusan. Namun belum ada regulasi untuk itu. Pemkab Karangasem, sudah sempat berkoordinasi ke pemerintah pusat, agar bisa menghapus tunggakan yang tidak mungkin bisa ditagih itu. Dan, disarankan membuat regulasi di daerah. Cuma, hingga saat ini, Pemkab Karangasem, belum menelurkan regulasi untuk bisa menghapus tunggakan tersebut. "Karena menyangkut penghapusan, kami masih berpikir ke depannya. Jangan sampai, menghapus itu membuat wajib pajak lainnya tidak bayar pajak. Biar tidak bahasa, toh juga akan dihapus," pungkas Toya. **(wan/gup)**

Edisi : Sabtu, 27 Juni 2015

Hal : 25